



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.148/M.PPN/HK/11/2023
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE TAHUN 2019-TAHUN 2022

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penataan keberlakuan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode Tahun 2019-Tahun 2022, perlu dilakukan pemetaan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah tidak berlaku, tidak efektif, sudah berakhir kegiatannya, dan/atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa status keberlakuan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode Tahun 2019-Tahun 2022, diperlukan pula dalam rangka pembaruan (*updating*) metadata pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Periode Tahun 2019-Tahun 2022.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERIODE TAHUN 2019-TAHUN 2022.

- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.148/M.PPN/HK/11/2023
TANGGAL 20 NOVEMBER 2023

PENCABUTAN BEBERAPA
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE TAHUN 2019-TAHUN 2022

1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.217/M.PPN/HK/12/2019 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/M.PPN/HK/01/2020 tentang Pembentukan Tim Penyiapan Penerapan Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.4/M.PPN/HK/01/2020 tentang Penetapan Pejabat Sebagai Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional;
4. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39/M.PPN/HK/03/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.192/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara;
5. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.45/M.PPN/HK/04/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.58/M.PPN/HK/05/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.66/M.PPN/HK/06/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.70/M.PPN/HK/07/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/M.PPN/HK/08/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.78A/M.PPN/HK/09/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.64/M.PPN/HK/04/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan DIPA/KPA Pengelola Hibah MCC Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79B/M.PPN/HK/09/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.87/M.PPN/HK/07/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda tangan DIPA/KPA Komite Nasional Keuangan Syariah;
13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79C/M.PPN/HK/10/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.86/M.PPN/HK/10/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.1/M.PPN/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Papua;
16. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.5/M.PPN/HK/01/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 Hibah Millennium Challenge Corporation;
17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/M.PPN/HK/03/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
18. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.41/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara;

19. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.131/M.PPN/HK/11/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.132/M.PPN/HK/11/2021 tentang Penetapan Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.150/M.PPN/HK/12/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.192/M.PPN/HK/10/2019 Tentang Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara;
22. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.43/M.PPN/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
24. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/M.PPN/HK/06/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati